PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat | Hari: Senin | Tanggal: 03 April 2023 | Halaman: 2

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Tunggakan Biaya Sekolah di Swasta Jadi PR Bersama

YOGYA (KR) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta selalu menganggarkan bantuan yang terkait langsung dengan siswa ber-C1 atau penduduk Kota Yogyakarta. Di antaranya berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), beasiswa untuk siswa berprestasi, Kartu Jogja Berprestasi (KJB) bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), beasiswa mahasiswa ber-KMS, bantuan keringanan tunggakan biaya sekolah dan lain sebagainya. Dari sekian banyak program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) tersebut, keringanan tunggakan biaya sekolah untuk siswa ber-C1 Kota Yogyakarta non KMS yang bersekolah di swasta dalam DIY sangat dirasakan manfaatnya.

Muhammad Ali Fahmi SE MM, sebagai anggota Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kotagede-Umbulharjo menyampaikan bahwa APBD Tahun 2022 untuk membiayai program keringanan tunggakan biaya sekolah sebesar Rp 1.032.215.000 hanya terserap Rp 857.604.000 atau sebesar 83,08 persen sehingga masih belum optimal. Di samping itu banyak orangtua siswa yang tidak mengakses program ini sehingga masih banyak tunggakan biaya di sekolah swasta yang belum terbayarkan.

Muhammad Ali Fahmi, SE, MM
Sekretaris Komisi D

KR-Istimewa

Hal ini terjadi karena banyak faktor, di antaranya sosialisasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta belum maksimal ke semua orangtua siswa. Selain itu orangtua siswa belum tahu cara mengakses program ini serta banyak faktor-faktor lainnya.

Menurut Fahmi, diharapkan saling bersinergi antara Pemkot, sekolah swasta, orangtua siswa dan lembaga lain yang dapat membantu meringankan permasalahan tunggakan biaya sekolah. Pendidikan sebagai hak anak memang menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang mengalami kendala ekonomi juga perlu ada keringanan beban yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu dari sisi Pemkot, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) perlu semakin memaksimalkan sosialisasi ke orangtua siswa terkait bantuan keringanan tunggakan biayan sekolah di swasta. Sedangkan bagi sekolah mensosialisasikan dan memfasilitasi berkas yang diperlukan untuk persyaratan pengajuan bantuan. Sementara peran orangtua siswa ialah dalam mengangsur maupun melunasi biaya sekolah serta proaktif dalam pengajuan berkas persyaratan yang diperlukan.

Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikoordinir oleh Pemkot juga dapat lebih dimaksimalkan perannya untuk turut serta membantu orangtua siswa dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya sekolah anaknya.

Fahmi menambahkan, dirinya yang duduk sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta selalu berkoordinasi dengan dinas terkait serta melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran agar program tersebut dapat tersosialisasikan secara optimal, berjalan dengan baik dan tercukupi anggaran di APBD setiap tahunnya. "Ke depan kita upayakan alokasi anggaran program tersebut naik lagi mengingat biaya sekolah di swasta juga meningkat," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005